



Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

Samsul Ode¹, Benediktus Dalupe¹, Surya Yudha Regif², Dejhawe Al Jannah¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, 85613 Timor Tengah Utara-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Apr 09, 2022

Diterima: Jul 15, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

COVID-19; Regional Head Election 2020; Voter Participation;

Koresponden:

Samsul Ode

Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta

Email:

samsul.ode@uta45jakarta.ac.id

Sitasi Cantuman:

Ode, S., Dalupe, B., Regif, S. Y., & Jannah, D. A. (2022). Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020. *Journal of Political Issues*, 4(1); 29-41. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The rise of 2020 regional electoral participation in the middle of Covid-19 is a continuation of the participation stability trend in the Indonesia election. This increment is in contrast to the democratic condition in Indonesia, which is deteriorating. The rise of participation is not affected by the actual conditions of COVID-19, it's occurred in areas with a high number of Covid-19 cases. Many electoral organizers and candidates have reportedly been exposed to coronavirus. The public perception improvement of regional electoral implementation and trust to the government achievement to handle pandemics support the rise of participation. But perception is not a single explanation. The reinforcing factors at a local level are a strong explanation for this. the different variant levels of participation in each region are determined by the intensity of competition and local political issues. This is closely related to political mobilization, voter character, and the rise of money politics. This research shows the failure of a thesis that high participation is linear with the level of democracy quality. The models of voting behavior also fail to explain why voter enthusiasm increases when economic conditions worsened due to the pandemic.

Abstrak Peningkatan partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya Covid-19 merupakan kelanjutan dari pada tren partisipasi yang stabil dalam pemilu di Indonesia. Peningkatan ini bertolak belakang dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang justru sedang memburuk. Peningkatan ini tidak dipengaruhi oleh kondisi perkembangan Covid-19 yang sesungguhnya. Peningkatan justru terjadi di daerah-daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Banyak penyelenggara pemilu dan kandidat dilaporkan telah terpapar virus. Membaiknya persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada dan kepercayaan pada pemerintah dalam penanganan pandemi mendukung meningkatnya partisipasi. Tetapi persepsi bukanlah penjelasan tunggal. Faktor-faktor yang menguat di tingkat lokal adalah penjelasan yang kuat untuk hal ini. Varian tingkat partisipasi yang berbeda-beda pada tiap daerah ditentukan oleh intensitas kompetisi dan isu politik lokal yang berkembang. Hal ini terkait erat dengan mobilisasi politik, karakter pemilih, dan maraknya politik uang. Riset ini menunjukkan gagalnya tesis linearitas partisipasi yang tinggi dengan tingkat kualitas demokrasi. Model perilaku pemilih juga gagal menjelaskan mengapa di saat kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi, antusiasme pemilih justru meningkat.

Tentang:

Samsul Ode, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2015, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Benediktus Dalupe, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2019, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Surya Yudha Regif, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2015, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor.

Dejhawe Al Jannah, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada padatahun 2021, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di tengah meningkatnya Covid-19 di Indonesia. Partisipasi pemilih yang justru meningkat di tengah bahaya penularan wabah menarik untuk dijelaskan. Penyelenggaraan pemilihan umum di tengah situasi pandemik melahirkan dua hal krusial yang dipertaruhkan negara yaitu kredibilitas dan legitimasi pemilu pada satu sisi, dan keselamatan publik pada sisi yang lain.

Penyebaran virus Covid-19 tidak saja menyediakan ancaman terbesar di bidang kesehatan publik. Kondisi ini juga telah memicu krisis ekonomi. Pemerintah Indonesia menanggung dilema yang besar. Membatasi warganya untuk tinggal di rumah, tetapi tidak sanggup menanggung biaya sosial dan ekonomi yang diakibatkannya. Di tengah upaya pembatasan pemerintah tetap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Kebijakan ini telah ditentang oleh para ahli wabah dan kalangan masyarakat sipil ([Galih, 2020](#); [Nathaniel & Amali, 2020](#)).

Pemerintah beralasan bahwa tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi akan berakhir meskipun demikian pembatasan (restriction) atau penguncian (lockdown) diterapkan sebagai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memiliki implikasi biaya sosial dan ekonomi pilkada harus tetap dilaksanakan demi menjamin hak konstitusional warga ([CNNIndonesia, 2020](#)). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mewanti-wanti siklus pilkada yang tengah berlangsung mengingat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan.

Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Pemungutan suara akan terjadi di 309 kabupaten/kota dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 100.359.152 juta. Ancaman penularan virus Covid-19 terkait pilkada tidak saja telah menysar pemilih, tetapi juga penyelenggara dan kandidat. Meskipun demikian partisipasi pemilih pada pilkada 9 Desember 2020 sebesar 76,13 persen. Angka ini hampir mencapai target KPU sebesar 77,5 persen. partisipasi ini meningkat sekitar 7 persen dibanding pilkada serentak pada 2015 sebesar 69,02 persen ([Meiliana, 2020](#)).

Peningkatan ini menarik untuk dianalisis di tengah situasi darurat kesehatan publik. Bila tidak ada pandemi, peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia bukanlah hal yang luar biasa. Sejak pilkada serentak tahun 2015, partisipasi pemilih cenderung meningkat. Apalagi bila dibandingkan dengan pemilu nasional secara umum dalam 15 tahun terakhir. Pada Pilkada serentak 2015 tingkat partisipasi pemilih hamper mencapai 70 persen. Angka itu naik pada Pilkada serentak 2017 yakni 74,2 persen, meski kemudian turun sedikit pada 2018, yakni 73,24 persen. Kecenderungan meningkatnya partisipasi pemilih juga terjadi dalam pemilu legislatif dan presiden. Partisipasi pada pemilu 2009 yaitu pileg 70,7 % dan pilres 71,7 %. Pada pemilu 2014 pileg 75,2 % dan pilres 70,9 % dan pada pemilu 2019 ketika pileg dan pilpres disatukan, partisipasi meningkat menjadi 81%.

Data IDEA Internasional menunjukkan sampai 11 November 2020 mencatat pemilu nasional terjadi di 56 negara pada masa pandemi Covid-19. Dari 56 negara tersebut hanya 19 negara mengalami kenaikan partisipasi pemilih. Selain itu terdapat 22 negara yang menysarakan pemilu sub-nasional (lokal). Hanya lima negara diantaranya mengalami peningkatan partisipasi ([idea.int, 2020](#)). Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sering dikaitkan dengan membaiknya demokrasi dan meningkatnya kepercayaan pemilih para institusi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penggabungan kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini berupaya mencari penjelasan yang memadai tentang meningkatnya partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya COVID-19. Dengan pendekatan komparatif dan eksploratif, riset ini akan

Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejhawe Al Jannah:

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

menjelaskan pengaruh dari pada faktor-faktor yang selama ini diyakini mempengaruhi partisipasi pemilih . Kemudian Beragam studi literatur dalam perspektif komparatif dan studi politik lokal di atas akan sangat membantu menerangkan kasus ini. Sejauh mana faktor-faktor yang dijelaskan di atas telah turut memengaruhi tingkat partisipasi yang terjadi dalam pilkada serentak 2020 di masa pandemik Covid-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilu di Tengah Pandemi: Gambaran Beberapa Negara

Di Eropa Barat, efek penguncian (lockdown) menguntungkan petahana dimana meningkatnya kepercayaan pada pemerintah dan dukungan pemilih untuk mereka (petahana) yang disertai adanya kepuasan terhadap demokrasi (Bol et al., 2020). Dalam kasus di pemilu Bavaria-Jerman, krisis kesehatan secara kuat dan konsisten menguntungkan petahana (Leininger & Schaub, 2020). Intensitas penguncian (lockdown) juga secara signifikan memengaruhi hasil pemilu dan perilaku pemungutan suara (Giommoni & Loumeau, 2020). Para petahana juga berpotensi menggunakan paket bantuan sosial di masa pandemi untuk kepentingan elektoral mereka. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia dalam pilkada serentak 2020 (Liputan6.com, 2021).

Situasi pandemi Covid-19 juga makin memperberat situasi pemilu di negara-negara yang rentan kekerasan. Di Nigeria misalnya pemilu di tengah pandemi semakin membawa ketidakpastian. Upaya penyelenggara untuk memastikan pemilu yang aman dan kredibel dalam konteks aturan Covid-19 dapat semakin memperumit partisipasi demokratis. Penggunaan masker wajah dalam pemilu misalnya menyulitkan identifikasi identitas orang yang terlibat dalam pengisian kotak suara dan pemalsuan hasil pemilu. Di Mali, dilema penyelenggaraan pemilu dalam kondisi pandemi lebih rumit daripada risiko kesehatan masyarakat itu sendiri. Faktor keamanan dan kerawanan pemilu berdampak pada partisipasi pemilih yang umumnya rendah, bahkan sejak pemilu sebelumnya pada 2013. Upaya untuk menghadirkan pemilu yang damai dan kredibel tidak saja ditentukan oleh persoalan teknis dan manajemen pemilu, tetapi juga konsensus elite pada proses pemilu (Gerenge 2020). Negara-negara yang tetap menyelenggarakan pemilu diharuskan mendesain tata pemilu agar tetap menjamin kesehatan publik, pada saat yang sama menjamin kredibilitas pemilu. Upaya-upaya terkait hal ini bukan tidak menyisahkan persoalan. Sejumlah negara mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan pemilu di tengah pandemi. Dalam kasus Polandia, kompromi elite diseperti proses pemilu menjadi penting untuk secara efektif menyelesaikan tantangan politik, hukum dan administratif dalam penyelenggaraan pemilu (Vashchanka 2020).

Rekomendasi para ahli pemilu untuk mendesain pemilu di masa pandemi dengan metode memilih dari rumah dan pemilihan suara elektronik dari telepon seluler sangat tergantung pada kredibilitas penyelenggara. Di Rusia, pemungutan suara dari rumah telah dikritik, mengingat rentannya perbedaan hasil pemungutan suara. Hal ini sering dikaitkan dengan praktik kecurangan pemilu. Pemungutan suara lewat seluler rentan pada pemungutan suara ganda. Demikian juga lewat internet yang rentan pada kebocoran data pribadi pemilih (Krivonosova 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan berbagai negara yang tetap melangsungkan pemilu untuk meminimalkan resiko penularan Covid-19. Di Selandia Baru, penyelenggara pemilu memperluas pemungutan suara alternatif. Pemungutan suara alternatif diperuntukkan bagi yang tidak dapat menghadiri tempat pemungutan suara. Penyelenggara pemilu memperluas layanan online untuk pemungutan suara, memperluas penggunaan telpon untuk pemilih disabilitas, pemungutan suara lewat pos, dan penggunaan kotak suara seluler. Di Ghana, pandemi Covid-19 telah memicu inovasi dari pada penyelenggara pemilu dan partai politik di dalam usaha memobilisasi pemilih. Di Bavaria, Jerman pemerintah mengubah metode pemungutan suara dalam pemilu yang berlangsung dua putaran dari awalnya konvensional

menjadi sepenuhnya melalui pos setelah terjadi peningkatan penularan Covid-19. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi partisipasi pemilih yang justru meningkat dalam dua putaran (Wagner 2020).

Korea Selatan adalah contoh yang baik dari pemilu yang berhasil di tengah pandemi. Pemilu di negara itu tetap dapat meminimalkan potensi penularan tetapi berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang signifikan (dari 58 % menjadi 66 %). Penyelenggara pemilu menyediakan prosedur untuk pemungutan suara lebih awal. Selain itu berbagai tindakan pencegahan yang ketat diatur sebagai kode etik pemilih. Perlindungan kesehatan dan tindakan pencegahan yang ketat oleh penyelenggara telah berhasil meyakinkan para pemilih (Spinelli, 2020).

Pilkada Serentak dan Covid-19 di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Melihat hasil pilkada dengan partisipasi pemilih yang meningkat, pemerintah dan penyelenggara mengklaim bahwa pilkada ini telah sukses dilakukan meskipun di tengah pandemi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan yang mengatur prosedur kampanye hingga tata cara pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Melalui peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, penyelenggara melarang sejumlah metode kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Penyelenggara hanya membolehkan pertemuan terbatas dan melarang rapat umum, atau bentuk kampanye apapun yang memicu kerumunan massa. Dalam metode pemungutan suara, penyelenggara tidak menyediakan opsi tambahan seperti pemilihan pendahuluan, pemungutan suara lewat pos dan e-voting sebagaimana digunakan di negara lain. Pemilih hanya dapat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Pengecualian bagi pasien Covid-19 dan petugas kesehatan petugas pemilihan tetap memfasilitas tersalurnya hak pilih dengan mendatangi lokasi pasien.

Meski telah ada aturan, kampanye yang berlangsung selama 71 hari dari 26 September hingga 5 Desember 2020 tetap sarat dengan pelanggaran protokol kesehatan. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) hingga 4 Desember 2020 ditemukan sebanyak 2.126 pelanggaran protokol kesehatan sepanjang masa kampanye (CNNIndonesia, 2020). Menjelang pelaksanaan pemungutan suara perkembangan Covid-19 di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Data yang diperbarui hingga 9 Desember 2020 terdapat 22 kabupaten kota digolongkan zona merah (Nugroho, 2020). Sedangkan berdasar pada data dari Relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid 19, hingga 4 Desember 2020 sebanyak 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif Covid-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Dari data itu terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif. Kemudian sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif. Empat wilayah tersebut yaitu Kota Depok dengan 2,407 kasus, Solo dengan 1.041 kasus, Wonosobo 1.439 kasus, dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah 1.270 kasus (LaporCovid19.org, 2020). Disadur dari data Survei Charta Politika pada 6-12 Juli 2020 kepada 2.000 responden menemukan sebesar 40,9 % publik tidak percaya pada data kasus Covid-19 yang disajikan pemerintah (CNNIndonesia, 2020). Hasil data yang diperoleh dalam artikel ini menunjukkan perkembangan kasus Covid-19 dalam sepuluh hari menjelang pilkada dengan pertambahan rata-rata dalam 10 hari terakhir tersebut adalah 5.884 kasus per hari dan kematian rata-rata kematian 135 orang per hari berikut disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 1 Data Perkembangan COVID-19 di Indonesia 29 November-8 Desember 2020

Tanggal	Akumulasi Kasus	Bertambah	Kasus Aktif	Suspek	Akumulasi Sembuh	Akumulasi Meninggal
29 November	534.266	6.267	71.658	70.792	445.793	18.815
30 November	538.883	4.617	71.420	72.786	450.518	16.945
1 Desember	543.975	5.092	72.015	71.286	454.879	17.081
2 Desember	549.508	5.533	73.429	71.074	458.880	17.199
3 Desember	557.887	8.369	77.969	69.027	462.553	17.355
4 Desember	563.680	5.803	80.023	69.016	466.178	17.479
5 Desember	569.707	6.027	81.669	69.926	470.449	17.589
6 Desember	575.796	6.089	83.285	70.019	474.771	17.740
7 Desember	581.550	5.754	84.481	72.986	479.202	17.867
8 Desember	586.842	5.292	85.345	70.450	483.497	18.000

Sumber: Satgas Nasional COVID-19

Perkembangan Covid-19 yang mengkhawatirkan tersebut maka pemungutan suara pada 9 Desember 2020 tak lepas dari persoalan protokol kesehatan. Bawaslu mendapatkan laporan sebanyak 1.454 TPS tak menyediakan fasilitas cuci tangan. Selain itu, sejumlah TPS dilaporkan tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh 37 derajat celcius. Bahkan menurut laporan Bawaslu sebanyak 1.172 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan positif Covid-19 tetap bertugas (Tirto, 2020). KPU sendiri menyatakan sebanyak 79.241 Petugas KPPS Pilkada 2020 reaktif Covid-19. Bawaslu menyebutkan banyak dari petugas KPPS Positif Covid-19 yang masih datang ke TPS (Raharjo, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa pilkada dilaksanakan dalam tingkat kewaspadaan yang rendah.

Perkembangan Covid-19 menjelang pencoblosan yang cukup mengkhawatirkan didapat dengan melihat perkembangan Covid-19 di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Di Provinsi Jawa Tengah sehari menjelang pilkada sebanyak 968 petugas KPPS terpapar COVID-19 usai menjalani tes swab. Di Sumatera Barat KPU melaporkan sebanyak 137 petugas KPPS positif Covid-19. Sementara di Provinsi Jambi, ratusan Petugas KPPS Positif Covid-19 tidak diganti (Tempo, 2020).

Berikut sampel 20 daerah kota dan kabupaten yang diambil sesuai dengan episentrum penyebaran virus untuk melihat perkembangan Covid-19 dan seberapa tingkat partisipasi pemilih yang terjadi pada 9 Desember 2020. Pemilihan sampel ini mempertimbangkan beberapa hal: (1). Daerah yang sudah terpapar Covid-19. (2) daerah ibukota dengan tingkat kepadatan dan keramaian yang memungkinkan intensitas penularan lebih tinggi. (3) wilayah Jawa dan luar Jawa. (4) representasi hampir dari setiap provinsi.

Tabel 2 Angka partisipasi beberapa kota dan kabupaten pada pilkada 2015 dan 2020

PEMILU	ANGKA PARTISIPASI	
	2015	2020
Kota Surabaya	52,17 %	52,4 %
Kab Jember	52,19 %	58,53 %
Kota Semarang	66,46 %	68,62 %
Solo	73,6 %	70,52 %
Kab.Sleman	72,8%	75,82 %
Kota Depok	56,84 %	62,79 %
Kab. Bandung	63,00 %	72,18 %
Kab. Karawang	67,60 %	70,02 %
Kota Denpasar	57,64 %	53,6 %
Kota Medan	26,88 %	45,97 %
Kota Dumai	68,13 %	65,08 %
Kota Bukittinggi	59,87 %	72,4 %

Kota Bandar Lampung	66,28 %	69,17 %
Kota Batam	48,14 %	64 %
Kota Tangerang Selatan	57,98 %	60,28 %
Kota Mataram	55,74 %	67,2 %
Kota Banjarmasin	65,01 %	56,13 %
Kota Samarinda	50,37 %	52,26 %
Kota Manado	52,79 %	74,35 %
Kota Palu	63,79 %	65,5 %
Kota Ternate	58,93 %	76,69 %

Sumber : * <https://pilkada2015.kpu.go.id/>

Kenaikan yang cukup tinggi ini menarik dilihat misalnya terjadi di daerah dalam provinsi episentrum seperti Depok, Kabupaten Bandung dan Jember. Kondisi Covid-19 di daerah-daerah tersebut cukup mengkhawatirkan. Sementara itu kota Surabaya yang sempat digolongkan zona hitam pada Juni 2020, boleh dikatakan stagnan dalam partisipasi pemilih. Ini meneruskan angka partisipasi yang rendah pada pilkada sebelumnya. Bila melihat data secara umum, peningkatan partisipasi yang cukup tinggi (di atas 5 %) terjadi di daerah kabupaten dalam pemilihan bupati/wakil bupati. Baru kemudian peningkatan di bawah 5 % pada pemilihan walikota dan pemilihan gubernur. Peneliti dari lembaga survei SMRC, Saidiman Ahmad menilai meningkatnya partisipasi di tengah pandemi karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Mobilisasi ini lazimnya pada pemilih pedesaan dan kurang terpelajar.

Tabel 3 Partisipasi rata-rata Pilkada Kabupaten, Kota dan Provinsi

Pilkada	Jumlah Daerah		Partisipasi rata-rata	
	2015	2020	2015	2020
Pilbub	224	224	70,36 %	77,52 %
Pilwakot	36	37	65,07 %	69,04 %
Pilgub	9	9	67,34 %	69,67 %

Sumber : KPU/ www.medcom.id

Bila melihat opini publik dua bulan sebelumnya, partisipasi pemilih dikhawatirkan benar-benar menurun akibat pandemi Covid-19. Hal itu dikonfirmasi oleh survei SMRC pada akhir September yang menunjukkan dukungan terhadap pilkada dilaksanakan di tengah pandemi hanya 51 persen. Selain itu dua organisasi agama terbesar di Indonesia yang mewakili mayoritas populasi yakni NU dan Muhammadiyah telah mendesak pemerintah agar pelaksanaan pilkada ditunda sampai pandemi berakhir. Sementara itu kebijakan sosial berskala besar yang diterapkan di sejumlah daerah akibat penularan virus yang terus meningkat juga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September memprediksi potensi penurunan partisipasi pemilih berkisar 20 sampai 60 persen. Survei Indikator Politik, pada 24-30 September 2020 kepada 1.200 responden (margin error 2.9%) menemukan sebanyak 50,2 % menilai pilkada harus ditunda dan 47,1 % mengaku ragu datang ke TPS. Hanya 40,7 % yang menyatakan akan datang ke TPS pada hari pemungutan suara (Imam, 2020).

Di kabupaten Sleman, Provinsi DIY beberapa hari menjelang pilkada seluruh kecamatan dilaporkan berwarna merah atau berisiko tinggi. Sementara itu di Kabupaten Bandung, 199 petugas KPPS Kabupaten Bandung Positif Covid-19 menjelang hari pencoblosan. Selain itu jumlah kasus positif di Kabupaten tersebut jelang pilkada telah melampaui 2.000 kasus. Peningkatan kasus menjelang pilkada juga terjadi di kabupaten

Karawang. Gubernur Jawa Barat telah menghimbau agar aktivitas pilkada dikurangi ([Kompas.com](https://www.kompas.com), 2020).

Peningkatan kasus positif menjelang pilkada juga terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah kemudian memberlakukan buka tutup akses ke kota tersebut. Kabupaten Jember dan tiga daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan beberapa hari menjelang Pilkada. Di Kota Manado sebanyak 1.038 petugas KPPS dilaporkan reaktif Covid-19. Hasil itu diperoleh setelah KPU melakukan rapid test kepada 7.987 petugas KPPS. Kondisi yang paling kritis ada Depok Jawa Barat dan Solo Jawa Tengah, dua dari 4 daerah dengan kasus aktif lebih dari 1.000 menjelang pilkada. Di Kota Bukittinggi, ketua Bawaslu Bukittinggi dilaporkan positif Covid-19 ([Raharjo](https://www.raharjo.com), 2020).

Dalam masa pilkada tidak hanya masyarakat biasa dan penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19. Sejumlah calon kepala daerah (Cakada) juga dilaporkan terpapar Covid-19. Data hingga 6 Desember 2020 sebanyak 76 cakada telah terpapar Covid-19, sebanyak 4 diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 76 cakada yang terpapar Covid-19 itu terdiri dari 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur. Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan ([LaporCovid19.org](https://laporcovid19.org), 2020).

Dari sampel kota/kabupaten yang diambil, beberapa kandidat yang dilaporkan terpapar Covid-19 yaitu cakada kota Depok, kota Semarang, kota Dumai, kota Banjarmasin, dan kota Ternate. Di Dumai seorang calon Wali Kota yang terpapar COVID-19 akhirnya meninggal pada akhir November 2020. Sementara itu di Kota Bukittinggi wakil Wali Kotanya harus diisolasi karena gejala diduga Covid-19. Demikian juga di Banjarmasin, seorang cakada dari jalur perseorangan terkonfirmasi positif Covid-19 ([Maudhody](https://www.maudhody.com), 2020). Hal yang sama juga di Ternate, Maluku seorang calon kepala daerah dilaporkan positif Covid-19.

Data perkembangan Covid-19 di atas menggambarkan maraknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye. Selain itu ada peningkatan kasus menjelang pilkada, banyaknya penyelenggara dan kandidat yang terpapar virus. Data dan perkembangan tersebut, seharusnya cukup memberi efek menakuti pemilih dan berpotensi menurunkan partisipasi sebagaimana diprediksi sebelumnya. Tetapi hal itu tidak terjadi, sebaliknya partisipasi justru meningkat.

Dalam situasi normal (tanpa Covid-19), peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak ini bukanlah hal yang mengejutkan. Partisipasi pemilih di Indonesia memang cenderung stabil setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Partisipasi pemilu dalam pemilu legislatif Indonesia sering digambarkan sebagai tinggi dari perspektif komparatif, dan tingkat partisipasi secara teratur melebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Data menunjukkan partisipasi dalam pemilu legislatif di Indonesia setelah pemilu 1999 cenderung stabil dikisaran angka 70 hingga 80-an persen.

Sejak undang-undang Pilkada menetapkan pilkada serentak yang dimulai pada 2015, angka partisipasi pemilih cenderung meningkat, meski sempat ada penurunan sedikit pada pilkada serentak 2018. Chaniago (2016) menilai ada hubungan antara sistem pemilu serentak dengan partisipasi pemilih yang meningkat. Dengan penyelenggaraan serentak, pilkada yang levelnya sebagai pemilu lokal dapat dikategorikan sebagai pemilu setingkat nasional. Menurut yang diatur undang-undang Pilkada, seluruh daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020.

Tabel 4 Angka Partisipasi Pilkada Serentak 2015-2020

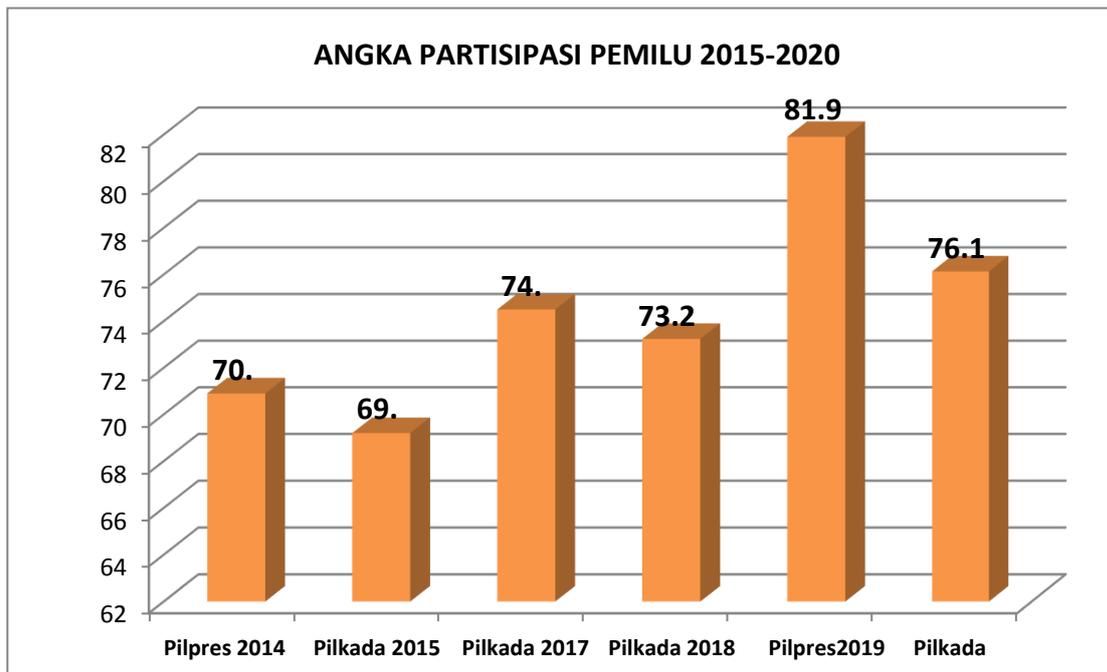
PILKADA SERENTAK	JUMLAH DAERAH			JUMLAH PEMILIH (DPT)	ANGKA PARTISIPASI
	Prov.	Kab.	Kota		
2015	9	224	36	96.869.739	69,20 %
2017	7	76	18	41.199.607	74,5 %

2018	17	115	39	152.057.054	73,24 %
2020	9	224	37	100.359.152	76,13 %

Sumber: KPU RI (2020)

Meningkatnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020 mengikuti tren peningkatan pada pemilu sebelumnya. Tidak berlebihan bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada pilkada serentak 2020, meskipun hasilnya sebesar 76,13 persen.

Partisipasi pemilih yang meningkat pada pilpres-pileg 2019 tak lepas dari masifnya mobilisasi pemilih menjelang pemilihan (Aspinall & Mietzner, 2019). Selain itu tingkat persaingan pemilihan presiden yang tinggi ketimbang pileg pada 2019 menjadi faktor yang meningkatkan partisipasi pemilih (Sardini & Erowati, 2020). Hal tersebut tergambar pada diagram dibawah ini:



Gambar 1 Angka Partisipasi Pilpres dan Pilkada 2014-2021

Penting untuk diamati perkembangan dari persepsi publik terhadap beberapa hal yakni: (1) persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri di tengah pandemi.(2) kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dalam mengatasi krisis.(3) kepuasan publik terhadap penanganan wabah. (4) kepuasan publik secara umum kepada pemerintah atau kepemimpinan nasional saat ini. Kondisi persepsi publik ini penting dilihat, mengingat pilkada serentak (2020) itu sendiri tak ubahnya event politik nasional dengan jumlah pemilih hampir separuh dari populasi pemilih secara keseluruhan.

Bila melihat persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada dalam Survei Indikator Politik pada 24-30 September 2020 kepada 1.200 responden, separuh publik (50,2 %) menilai pilkada harus ditunda. Bila pilkada tetap digelar, 47,1 persen responden mengaku ragu datang ke TPS dan hanya 40,7 % yang menyatakan akan datang. Sebanyak 68,7% setuju bahwa penyelenggaraan pilkada serentak tersebut sangat rawan penyebaran virus corona (Imam, 2020). Tetapi persepsi ini berubah pada November terlihat dalam survei nasional SMRC. SMRC menyurvei 1201 responden pada 18-21 November. Mayoritas warga sebesar 77 % merasa khawatir bila pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Tetapi ketika

dihadapkan pada dua pilihan, mayoritas warga sebesar 64 % ingin pilkada tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Hanya 28 persen yang menghendaki pilkada ditunda. Meski mayoritas merasa khawatir dengan Covid-19, mereka tetap menginginkan pilkada dilaksanakan.

Masih dari data survei SMRC 18-21 November ditemukan sebanyak 83 % warga yang berada di daerah pilkada mengaku akan ikut memilih pada 9 Desember 2020. Meski ditemukan dukungan pilkada dan pengakuan akan ikut memilih yang tinggi, ditemukan juga warga kurang peduli pada protokol kesehatan. Pada survei SMRC pada 4-7 November 2020 kepada 1200 responden, hanya sekitar 47 % warga yang menyatakan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Persepsi publik berupa dukungan terhadap pilkada sesuai jadwal pada November dalam survei SMRC berbuah partisipasi yang meningkat pada pilkada 9 Desember. SMRC mengonfirmasi hal ini dalam survei mereka pada 9-12 Desember 2020 dimana peningkatan partisipasi pemilih terjadi. Sebesar 76 % warga yang tinggal di daerah pilkada ikut memilih pada 9 Desember 2020. Menariknya, dari 24 % yang tidak ikut memilih, sebanyak 47 % (11 % dari populasi pemilih) beralasan sedang di luar kota. Sementara itu hanya sebesar 24 % (6% dari populasi pemilih) yang tidak ikut memilih karena takut tertular atau menularkan virus corona. Artinya banyak warga yang tidak ikut memilih pada 9 Desember justru bukan karena berdiam di rumah karena takut tertular virus melainkan karena sedang bepergian ke luar kota. Hari libur pilkada justru dimanfaatkan untuk bepergian, kegiatan yang sebenarnya dilarang dalam masa pembatasan sosial.

Terkait dengan protokol kesehatan SMRC menemukan hampir semua pemilih memakai masker (95 %) dan menjaga jarak (97 %) saat berada di TPS. Mayoritas warga pemilih (72 %) merasa khawatir tertular Covid-19. Meski demikian mayoritas warga percaya protokol kesehatan dapat ditegakkan dan menurut SMRC hal itu mendorong tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Sedangkan terkait kualitas pelaksanaan pilkada, masih dalam survei SMRC 9-12 Desember 2020, mayoritas warga menilai pilkada berjalan dengan sangat/cukup jujur dan adil (jurdil). Sebanyak 83 % yang merasa puas dengan pelaksanaan pilkada dan sebanyak 85 % yang merasa yakin bahwa pilkada akan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa perubahan di daerah.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih yang berpartisipasi, mayoritas dari mereka patuh pada protokol kesehatan saat di TPS. Meskipun mayoritas tetap memiliki rasa khawatir tertular virus. Dapat disimpulkan: pertama, dari aspek protokol kesehatan, pemilih menganggap protokol ditegakkan dengan baik. Hal itu menunjukkan tingginya kepercayaan pemilih kepada penyelenggara pemilu dalam penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara. Kedua dari aspek kredibilitas pemilu, pemilih menganggap pilkada sudah berjalan dengan jurdil dan dibuktikan dengan angka kepuasan yang tinggi.

Dengan demikian perkembangan Covid-19 secara real-time dan efek menakuti yang seharusnya ditimbulkannya tidak signifikan memengaruhi persepsi publik. Kekhawatiran terhadap bahaya penularan Covid-19 teratasi dengan persepsi publik yang positif dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Riset ini tidak memiliki bukti yang cukup kuat bahwa penurunan partisipasi di beberapa daerah dikarenakan oleh kondisi perkembangan Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Sementara itu peningkatan partisipasi pemilih justru terjadi di daerah-daerah dengan kasus positif yang tinggi.

Faktor persepsi publik dan data yang diajukan di atas memang tidak berdiri sendiri dan menjadi penjelasan tunggal. Faktor institusional dan meningkatnya kesadaran politik pemilih merupakan situasi yang mendukung atau meneruskan tren partisipasi pemilih yang stabil atau cenderung meningkat di Indonesia. Stabilitas partisipasi pemilih di angka yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh beragam faktor. Secara nasional, sistem pemilihan adalah salah satu penjelasan yang kuat untuk tren partisipasi pemilih yang stabil tersebut. Sementara

itu varian partisipasi politik yang berbeda-beda di berbagai daerah memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan terperinci melalui penelitian politik lokal.

Politik lokal merupakan penjelasan yang paling kuat bila ingin melihat secara spesifik varian tingkat partisipasi yang berbeda-beda di tiap daerah. Riset ini misalnya tidak sampai menjelaskan mengapa partisipasi politik yang amat rendah di kota Medan lima tahun lalu justru meningkat hampir 100 % dalam pilkada kali ini. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Depok, dimana partisipasi meningkat signifikan justru di tengah angka positif yang tinggi. Dan beberapa kota dan kabupaten lain dengan fenomena serupa.

Angka partisipasi yang signifikan (di atas 5 %) dan kemudian itu signifikan mempengaruhi angka partisipasi rata-rata secara nasional disumbangkan oleh partisipasi rata-rata dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Penyebab dari hal ini cukup sederhana dijelaskan. Pertama, intensitas penularan virus, jumlah kasus positif dan informasi akan bahayanya di kabupaten- kabupaten terutama di luar provinsi episentrum Covid-19 (terutama luar Jawa) tidak sebesar dan semenakutkan dibanding di daerah episentrum atau daerah ibukota. Kedua, sebagaimana pendapat peneliti SMRC, mobilisasi pemilih yang tinggi paling berpotensi menyasar pemilih kurang berpendidikan dan tinggal di pedesaan.

Untuk itu pendekatan studi politik lokal adalah jalan untuk memeriksa bagaimana intensitas kompetisi dan isu politik lokal yang menguat. Bagaimana hal itu kemudian memengaruhi mobilisasi pemilih, perilaku pemilih, intensitas politik uang hingga kepercayaan pemilih pada institusi pemilihan setempat. Hal-hal tersebut adalah bagian dari faktor-faktor yang telah disebutkan turut memengaruhi partisipasi pemilih di Indonesia.

SIMPULAN

Peningkatan partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya pandemi, adalah kelanjutan dari pada tren partisipasi yang cenderung meningkat dan stabil. Peningkatan itu didorong oleh persepsi publik yang positif terutama terhadap pilkada dan penanganan pandemi dan kepada kinerja pemerintah secara umum. Hal ini mendukung tesis para sarjana bahwa kepercayaan pemilih pada kredibilitas pemilu menentukan tingkat partisipasi. Namun demikian persepsi yang positif tersebut tidak benar-benar merefleksikan kondisi sebenarnya dari perkembangan Covid-19 di Indonesia, dan seberapa baik penanganan yang dilakukan pemerintah. Peneliti menduga hal ini berkaitan dengan meningkatnya kadar partisan dan pembelahan politik yang tinggi di Indonesia. Kondisi ini berkonsekuensi pada pemihakan total pada salah satu kubu politik yang kemudian menjadi basis yang memengaruhi persepsi dan dukungan politik. Dugaan ini menjadi rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penelitian ini tidak menyatakan seberapa besar efek dari pada persepsi positif di atas bagi peningkatan partisipasi. Karena itu, faktor tersebut tidak menjadi penjelasan tunggal. Pemeriksaan lokal secara terperinci dibutuhkan untuk melihat varian partisipasi yang berbeda-beda pada tiap daerah. Karena itu, faktor politik lokal menjadi penjelasan yang kuat, mengapa justru di daerah yang tingkat penularan yang tinggi partisipasi meningkat signifikan. Intensitas kompetisi, mobilisasi pemilih, isu lokal dan karakter pemilih di daerah, politik uang, hingga kredibilitas penyelenggara setempat adalah variabel-variabel yang kuat untuk ini. Peningkatan partisipasi ini membuktikan bahwa faktor kondisi ekonomi sebagaimana ditawarkan dalam pendekatan perilaku pemilih bukan penjelasan yang tepat. Dalam situasi ekonomi memburuk akibat pandemi, justru antusiasme pemilih mewujud dalam partisipasi yang meningkat. Pemilih kurang berpendidikan, miskin, di pedesaan lebih besar angka partisipasinya bila melihat data partisipasi rata-rata pilkada kabupaten.

Meskipun partisipasi pemilih meningkat, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan kondisi demokrasi yang secara umum membaik di Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia

Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejhawe Al Jannah:

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit berada pada skor terendah dalam 14 terakhir (bdk dw.com 4/2/2021). Data ini terkonfirmasi dalam survei Indikator Politik Indonesia pada 24- 30 September 2020 yang menyimpulkan bahwa Indonesia kurang demokratis. Selain itu praktek pembelian suara atau politik uang di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Survei nasional LIPI terkait pemilu 2019 menemukan 40 persen menerima uang dari kandidat pada pemilu 2019. Demikian juga survei dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) pada Januari hingga Maret 2020 mendapati 60 % pemilih mau menerima politik uang. Karena itu studi lebih lanjut sangat diharapkan untuk menjawab dugaan, keraguan dan kelemahan di dalam penelitian ini. Survei nasional tidak mampu menjelaskan varian lokal pada tiap daerah yang justru bisa menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2020). The effect of COVID-19 lockdowns on political support: Some good news for democracy? *European Journal of Political Research*, 60(2), 497–505. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12401>
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- CNNIndonesia. (2020, December 4). Bawaslu Catat 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada>
- Galih, B. (2020, September 5). Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, LSI Ungkap Potensi Penurunan Pemilih Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/14554071/pilkada-2020-di-tengah-pandemi-lsi-ungkap-potensi-penurunan-pemilih?page=all>
- Gerenge, R. 2020. "Managing Elections Under Covid-19 Pandemi Conditions: The Case Of Mali". *International IDEA Case Study 5/2020*. Retrieved from: https://www.idea.int/sites/default/files/managing-elections-under-Covid-19-pandemic-conditions-the-case-of-mali_en.pdf
- Giommoni, T., & Loumeau, G. (2020). Lockdown and Voting Behaviour: A Natural Experiment on Postponed Elections during the COVID-19 Pandemic. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3659856>
- Idea.int. (2020, December 21). Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu (Bahasa Indonesia). IDEA. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia>
- Imam, R. (2020, October 26). Sederet Hasil Survei Indikator: Pilkada saat Pandemi hingga 3 Besar Capres 2024. *kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-hasil-survei-indikator-pilkada-saat-pandemi-hingga-3-besar-capres-2024-1uShOxY8NdS>

- Kompas.com. (2020, December 8). 968 Petugas KPPS Pilkada Jateng Positif Covid-19, KPU Pastikan Sebagian Besar Sudah Sembuh. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/21243461/968-petugas-kpps-pilkada-%20jateng-positif-Covid-19-kpu-pastikan-sebagian-besar>
- Krivososova, I. "Electoral events in Russia during the COVID-19 pandemic: remote electronic voting, outdoor voting and other innovations". International IDEA Case Study 6/2020. <https://www.idea.int/sites/default/files/electoral-events-in-russia-during-the-Covid-19-pandemic-remote-electronic-voting-outdoor-voting-and-other-innovations-en.pdf>
- Laporcovid19.org. (2020). Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat. Laporcovid.org. <https://laporcovid19.org/2020/12/pilkada-2020-abaikan-keselamatan-rakyat/>
- Leininger, A., & Schaub, M. (2020). Voting at the dawn of a global pandemic. SocArXiv Papers. <https://doi.org/10.31235/osf.io/a32r7>
- Liputan6.com. (2021, January 14). Yusril: Putusan Bawaslu Lampung dan KPU Bandar Lampung Sudah Berkekuatan Hukum. <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4457649/yusril-putusan-bawaslu-lampung-dan-kpu-bandar-lampung-sudah-berkekuatan-hukum>
- Maudhody, A. (2020, September 8). Pilkada Kalsel 2020, Empat Bakal Calon yang Positif Covid-19 Jalani Karantina Mandiri. Banjarmasinpost.co.id. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/09/08/pilkada-kalsel-2020-empat-bakal-calon-yang-positif-covid-19-jalani-karantina-mandiri>
- Meiliana, D. (2020, October 27). KPU: Ada 100.359.152 Pemilih Terdaftar di DPT Pilkada 2020 Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/09142741/kpu-ada-100359152-pemilih-terdaftar-di-dpt-pilkada-2020?page=all>
- Nathaniel, F., & Amali, Z. (2020, December 9). 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 2020. tirto.id. <https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2>
- Nugroho, R. S. (2020, December 9). Ada 22 Daerah Zona Merah yang Gelar Pilkada Serentak 2020, Mana Saja? Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/09/092736065/ada-22-daerah-zona-merah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020-mana-saja?page=all>
- Raharjo, D. B. (2020, December 10). Bawaslu Sebut Banyak Petugas KPPS Positif Covid-19 Masih Datang ke TPS. suara.com. <https://www.suara.com/news/2020/12/10/103124/bawaslu-sebut-banyak-petugas-kpps-positif-covid-19-masih-datang-ke-tps>
- Sardini, N., & Erowati, D. (2020). "The Coattail-Effect" in the Concurrent Elections in Indonesia: Study on Increasing Turnouts and Use of Voting Rights in the 2019

Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejhawe Al Jannah:

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

Elections. Proceedings of the Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019, 21–22 October 2019, Semarang, Central Java, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294415>

Spinelli, A. (2020). Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of IDEA. <https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test>

Tempo. (2020, December 8). Pilkada 2020: KPU Sumbar Catat 137 Petugas KPPS Positif Covid-19. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1412503/pilkada-2020-kpu-sumbar-catat-137-petugas-kpps-positif-covid-19>

Vashchanka, V. (2020). Political manoeuvres and legal conundrums amid the COVID-19 pandemic: the 2020 presidential election in Poland. *International IDEA Case Study 2/2020*. <https://www.idea.int/sites/default/files/political-manoevres-and-legal-conundrums-2020-presidential-election-poland.pdf>

Wagner, R. (2020). Responding to COVID-19 with 100 per cent postal voting: Local elections in Bavaria, Germany. *International IDEA Case Study 4/2020*. <https://www.idea.int/sites/default/files/responding-to-Covid-19-with-postal-voting-local-elections-in-bavaria.pdf>